

**IMPLEMENTASI *CIVIC RESPONSIBILITY* DALAM
PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA
(Studi Deskriptif pada Pembangunan Bandar Internasional di Desa
Sukakerta Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Kewarganegaraan



Oleh:

Naufal Adli Althaf

NIM 1505386

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019**

**IMPLEMENTASI *CIVIC RESPONSIBILITY* DALAM
PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA**

**Oleh
Naufal Adli Althaf
NIM. 1505386**

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

©Naufal Adli Althaf
Universitas Pendidikan Indonesia
2019

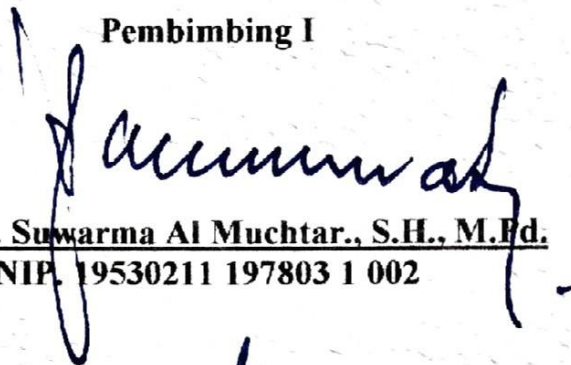
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak
ulang, difotocopy, atau dengan cara lainnya tanpa seizin peneliti.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CIVIC RESPONSIBILITY* DALAM
PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA
(Studi Deskriptif Pembangunan Bandar Internasional di Desa
Sukakarta Kabupaten Majalengka)**

disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I



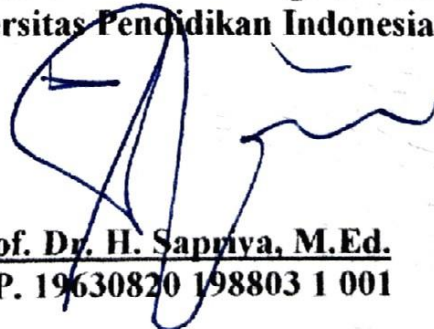
Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar., S.H., M.Ed.
NIP. 19530211 197803 1 002

Pembimbing II



Dwi Iman Muthaqqin, S.H., M.H.
NIP. 19861206 201504 1 001

**Mengetahui,
Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia**



Prof. Dr. H. Saptiya, M.Ed.
NIP. 19630820 198803 1 001

Skripsi telah diuji pada,

Hari/Tanggal : Senin/ 29 April 2019

Tempat : Gedung FPIPS UPI Bandung

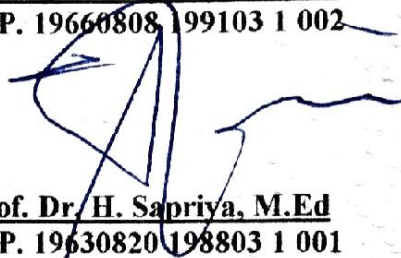
Panitia ujian terdiri dari :

1. Ketua :



Dr. Agus Mulyana, M.Hum
NIP. 19660808 199103 1 002

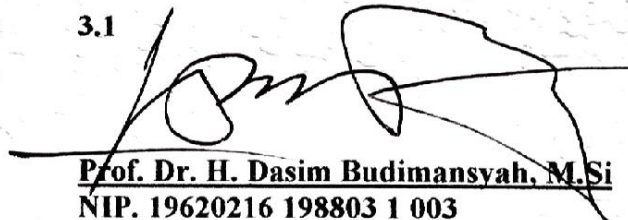
2. Sekretaris :



Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed
NIP. 19630820 198803 1 001

3. Penguji :

3.1



Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si
NIP. 19620216 198803 1 003

3.2



Prof. Dr. Endang Danial AR, M.Pd., M.Si
NIP. 19500502 197603 1 002

3.3



Dr. Susan Fitriyasari, M.Pd.
NIP. 19820730 200912 2 004

ABSTRAK

Naufal Adli Althaf, 1505386. IMPLEMENTASI *CIVIC RESPONSIBILITY* DALAM PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Sebagai timbal balik dari negara, masyarakat harus memiliki *civic responsibility* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membantu dan mengembangkan negaranya dalam pembangunan negara. Peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara garis besar akan mencakup segi perencanaan dan pelaksanaan terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan yang dibutuhkan oleh warga negara itu sendiri dan diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan pada warga. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan lahan untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dengan cara pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk *civic responsibility* dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan cara memberikan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat. (2) Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah warga dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (3) Kendala yang terdapat dalam pengadaan tanah terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal yang salah satunya adalah keterbatasan anggaran. (4) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pengadaan tanah adalah dengan memberikan ganti rugi pada pemilik yang berhak atas tanah.

Kata Kunci: *Civic Responsibility*, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

ABSTRACT

Naufal Adli Althaf, 1505386. IMPLEMENTATION OF CIVIC RESPONSIBILITY IN THE PROCUREMENT OF LAND BY THE STATE.

This research is motivated by state's obligation to provide welfare to the society. As a reciprocity from the state, the society must have civic responsibility in the life of the nation and state by helping and developing their state in the state's development. The role of citizens in the life of the nation and state in broad outline will cover the aspects of planning and implementation, especially in relation to the making of development decisions or policies needed by the citizen themselves and are expected to advance public welfare. Infrastructure development is one of the efforts to provide welfare to citizens. In infrastructure development, land is needed to carry out development in the public interest by procurement of land. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data analysis techniques by reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The results of the research show that (1) The form of civic responsibility in the procurement of land for the public interest is by providing rights to land owned by citizens and supporting government programs in the development of the International Airport of West Java. (2) Legal protection for ownership of citizens' land in the procurement of land for public purposes is regulated in Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest (3) Constraints in land acquisition consist of internal constraints and external constraints, one of constraint is limited budget. (4) The effort made by the government to complete land acquisition is to provide compensation to the rightful owner of the land.

Keywords: Civic Responsibility, Procurement of Land, Public Interest.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Struktur Organisasi Skripsi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Mengenai Implementasi	12
2.1.1 Pengertian Implementasi	12
2.1.2 Teori-teori Implementasi	13
2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi	16
2.2 Tinjauan Mengenai Negara	17
2.2.1 Pengertian Negara	17
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Negara	19
2.2.3 Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	22
2.3 Tinjauan Mengenai Pembangunan untuk Kepentingan Umum	24
2.3.1 Pengertian Pembangunan	24
2.3.2 Pengertian Kepentingan Umum	25
2.3.3 Jenis-jenis Kepentingan Umum	27
2.4 Tinjauan Mengenai <i>Civic Responsibility</i>	30
2.4.1 Pengertian <i>Civic Responsibility</i>	30
2.4.2 Karakteristik <i>Civic Responsibility</i>	34

2.5 Tinjauan Mengenai Hukum Tanah Indonesia	36
2.5.1 Pengertian Pengadaan Tanah	36
2.5.2 Asas-asas dalam Pengadaan Tanah	37
2.5.3 Dasar Hukum Pengadaan Tanah	40
2.5.4 Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	42
2.6 Tinjauan Mengenai Pencabutan Hak Atas Tanah	43
2.6.1 Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah	43
2.6.2 Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Desain Penelitian	47
3.1.1 Pendekatan Penelitian	47
3.1.2 Metode Penelitian	48
3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian	49
3.2.1 Partisipan Penelitian	49
3.2.2 Tempat Penelitian	50
3.3 Prosedur Penelitian	51
3.3.1 Tahap Pra Penelitian	51
3.3.2 Tahap Perizinan Penelitian	51
3.3.3 Tahap Pelaksanaan Penelitian	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.4.1 Observasi	52
3.4.2 Wawancara	53
3.4.3 Studi Dokumentasi	54
3.4.4 Studi Literatur	54
3.4.5 Catatan Lapangan	55
3.5 Teknik Analisis Data	55
3.5.1 Reduksi Data	56
3.5.2 Penyajian Data	57
3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	57
3.6 Validitas Data	58
3.6.1 Perpanjangan Pengamatan	58
3.6.2 Meningkatkan Ketekunan	58

3.6.3 Triangulasi.....	59
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	60
4.1.1 Letak Geografis	60
4.1.2 Sejarah Desa Sukakarta	60
4.1.3 Identitas Desa	62
4.1.4 Sumber Daya Manusia	63
4.1.5 Subjek Penelitian.....	64
4.2 Deskripsi Temuan Penelitian	65
4.2.1 Bentuk <i>civic responsibility</i> yang dilakukan masyarakat Desa Sukakarta dalam pengadaan tanah oleh Negara	65
4.2.2 Perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat Desa Sukakarta dalam pengadaan tanah oleh Negara.....	70
4.2.3 Kendala-kendala yang ditemukan dalam pengadaan tanah oleh Negara di Desa Sukakarta	75
4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar kendala dalam pengadaan tanah dapat terselesaikan.....	78
4.3 Pembahasan Temuan Penelitian.....	81
4.3.1 Bentuk <i>civic responsibility</i> yang dilakukan masyarakat Desa Sukakarta dalam pengadaan tanah oleh Negara	81
4.3.2 Perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat Desa Sukakarta dalam pengadaan tanah oleh Negara.....	87
4.3.3 Kendala-kendala yang ditemukan dalam pengadaan tanah oleh Negara di Desa Sukakarta	94
4.3.4 Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar kendala dalam pengadaan tanah dapat terselesaikan.....	99
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	103
5.1 Simpulan.....	103
5.1.1 Simpulan Umum	103
5.1.2 Simpulan Khusus.....	104

5.2 Implikasi	105
5.3 Rekomendasi	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Makna dan Jenis Kegiatan untuk Kepentingan Umum dalam Peraturan Perundang-undangan	27
Tabel 3.1 Partisipan Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Kepala Desa Sukakerta	61
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia	64
Tabel 4.3 Subjek Penelitian.....	65
Tabel 4.4 Hasil Triangulasi Sumber Informasi	84
Tabel 4.5 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	85
Tabel 4.6 Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah	89
Tabel 4.7 Hasil Triangulasi Sumber Informasi	91
Tabel 4.8 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	91
Tabel 4.9 Hasil Triangulasi Sumber Informasi	95
Tabel 4.10 Hasil Triangulasi Sumber Informasi	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi.....	14
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data	56
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber	59
Gambar 3.3 Triangulasi Teknik	59
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Sukakerta	63

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman. (1996). *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Affandi, Mukhtar. (1971). *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri, Y. Zainul dan Mulyadi Subri. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bohari, H. (1992). *Hukum Anggaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brierly, J.L. (1996). *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara.
- Budiaman, Arif. (1997). *Teori Negara Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.
- Budimansyah D dan Suryadi. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Pasca Sarjana, UPI.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danial, Endang & Wasriah, Nanan. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Diponalo, G.S. (1975). *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ivar, Mac. (1984). *Negara Modern*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kusnadi dan Bintan. (1985). *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press.
- Limbong, Bernhard. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Miles, M.B & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moh. Kusnardi & Ibrahim. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudakir Iskandar Syah. (2014). *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurmalina, K dan Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn.
- Patilama, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rubaie, Ahmad. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: Bayumedia.
- Schmid, J.J Von. (1980). *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*. (Diterjemahkan oleh Wiranto, dkk) Jakarta: Pt. Pembangunan.
- Salindeho, John. (1988). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, P Sondang. (2007). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, Dan Strategisnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, P Sondang., (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Simorangkir, J.C.T. dan B. Mang Rengsay. (1982). *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Jembatan.
- Soekanto, Soejono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soeriatmadja, Arifin P. (1986). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia.
- Soetomo. (1986). *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Starke, J.G. (1989). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhino. (1980). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan Komoetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sulaeman, Abdullah. (2010). *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sulhan, Najib. (2010). *Pembangunan Karakter Pada Anak: Manajemen Pembelajaran Guru*. Surabaya: Surabaya Internasional Club.
- Sumardjono, Maria S.W. (2007). *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*. Jakarta : Kompas.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, I, K. (1998). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Tri Prasetya, Joko. (1998). *Ilmu Budaya Dasar (Lengkap)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widagdho, Djoko, dkk. (2012). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wresniwiro. (2012). *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.
- Wuryan, S dan Syaifullah. (2009). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium PKn, UPI.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Sumber Jurnal

- Alfitri. (2012). *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Vol. 9, Nomor 3. Fakultas Syariah, STAIN Samarinda.
- Annivelorita. (2015). Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten

Nunukan. *eJournal Administrasi Negara*: Volume 3 Nomor 5. ISSN 000-000.

- Budhayati, Christina Tri. (2012). *Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum.
- Chotimah, Umi. (2012). *Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence, Civic Participation dalam Civic Responsibility*. Palembang: PS PKN FKIP Universitas Sriwijaya.
- Kiswanto, Eddy. *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Vol. 9, Nomor. 2. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Koeswahyono, Imam. (2008). *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Marilang. (2012). *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Vol. 9, Nomor 2. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Marilang. (2010). *Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan*. Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana UNHAS.
- Mulyono, Budi. (2017). *Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal*. Vol. 14, Nomor 2. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muthaqqin, Dwi Iman. (2016). *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin Sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi*. Vol. 20, Nomor. 2. Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS UPI.
- Rejekiingsih, Triana. (2016). *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*. Vol. 5, No 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Usman. (2015). *Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)*. Vol. 4, Nomor 1. Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Zakie, Mukmin. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Zulfikar, Waluyo. (2017). *Dampak Sosial, Ekonomi dan Politis dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*. Vol. 1, Nomor 1. Jurnal Caraka Prabu.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sumber Tesis

Alam, Wahyu Candra. (2010). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya*. Semarang: Universitas Diponegoro.